

**PSEKP/2015
1803.009.001.011D**

LAPORAN AKHIR TA. 2015

**KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
PETERNAKAN Mendukung Peningkatan
PRODUKSI DAGING**



Oleh:

Nyak Ilham
Saptana
Adreng Purwoto
Yana Supriyatna
Tjetjep Nurasa

**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN

1. Industri peternakan, khususnya produk daging dan jerochannya terkait dengan 66 industri lain, sedangkan produk daging olahan dan awetan lain terkait dengan 54 industri lain. Angka pengganda output produk daging dan jerochan bernilai 1,89 dan untuk produk daging olahan dan awetan 2,34. Artinya, jika permintaan pada industri ini meningkat masing-masing Rp1,00 maka output nasional secara total akan meningkat masing-masing Rp1,89 dan Rp2,34.
2. Meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendapatan, dan pangsa penduduk di perkotaan mendorong peningkatan konsumsi daging sapi dari waktu ke waktu. Permintaan yang terus meningkat dan belum mampu dipenuhi dari produksi domestik. Untuk periode 2015-2019 program peningkatan produksi daging sapi masih tetap menjadi prioritas dengan target pertumbuhan produksi daging sapi rata-rata 10,8 persen per tahun.
3. Permasalahannya adalah terjadi dualisme ekonomi dalam industri peternakan sapi nasional. Tumbuhnya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan integrasi vertikal. Pada sisi lain, usaha peternakan rakyat yang awalnya merupakan tulang punggung industri peternakan nasional, keberadaan dan perannya semakin menurun. Lemahnya daya saing usaha peternakan rakyat antara lain disebabkan terbatasnya ketersediaan sapi bibit/bakalan, belum berkembangnya industri pakan berbahan baku lokal, dan manajemen rantai pasok daging sapi/kerbau belum berjalan optimal, sehingga belum terbangun koordinasi produk maupun koordinasi antar pelaku usaha secara sinergis.
4. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pengembangan industri peternakan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengkaji struktur industri peternakan sapi dan kerbau; (2) Menganalisis kelayakan usahaternak sapi dan kerbau; (3) Mengkaji kinerja manajemen rantai pasok produk daging sapi dan kerbau; (4) Mengidentifikasi masalah dan kendala penerapan manajemen rantai pasok daging sapi dan kerbau.
5. Cakupan kajian ini dikhususkan pada: Komoditas daging sapi dan kerbau; Struktur industri mencakup usaha skala kecil, menengah dan besar; dan Rantai pasok daging sapi dan kerbau mencakup produsen, pedagang ternak, pedagang daging, industri pengolah, dan industri kuliner. Lokasi kajian di daerah sentra produksi dan pusat konsumsi di Pulau Jawa, yaitu: Di provinsi Jawa Tengah, dipilih Kota dan Kabupaten Semarang serta Kabupaten Boyolali. Pada Provinsi Banten dipilih Kota dan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Pada Provinsi Jawa Barat dipilih Kabupaten Ciamis, dan

Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor. Pada Provinsi Jawa Timur dipilih Kabupaten Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan Kota Surabaya.

6. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, sedangkan data primer diperoleh dari 138 orang responden terdiri dari berbagai unsur, yaitu staf pada instansi terkait, peternak sapi dan kerbau, pedagang ternak dan daging sapi dan kerbau, pengelola rumah potong hewan, pengelola pasar hewan, industri pengolahan daging, dan pengurus asosiasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan grafis dengan berbagai teknik, seperti: pangsa, rasio, *Indeks Hirschman Herfindahl* dan *CR4*, *analisis finansial* dan R/C rasio, dan analisis nilai tambah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Industri Sapi dan Kerbau

7. Pangsa populasi di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, kemudian diikuti Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua. Dinamika pangsa populasi sapi berdasarkan pulau tidak ada perubahan signifikan. Peningkatan pangsa populasi terjadi di provinsi Sumatera Utara, Lampung, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan.
8. Konsentrasi populasi kerbau pada periode 2010-2014 di Sumatera berkisar 39-48 persen, Jawa 23-28 persen, Nusatenggara 16-22 persen, Sulawesi 7-9 persen, Kalimantan 3-4 persen dan Maluku dan Papua 1-2 persen. Tingginya konsentrasi kerbau di Sumatera dibandingkan di Jawa terkait pada pola pemeliharaan kerbau yang cenderung semi intensif dan ekstensif dimana kedua pola tersebut membutuhkan lahan penggembalaan dan tempat berkubang yang semakin sulit ditemui di Jawa.
9. Berdasarkan konsentrasi populasi sapi dan kerbau di Indonesia, basis industri peternakan sapi dan kerbau masih bertahan pada lokasi-lokasi utama di Jawa, Nusatenggara dan Sulawesi diikuti daerah perkembangan baru di Sumatera. Di kawasan Sumatera pengembangan sapi potong sudah mulai mengarah pada usaha integrasi dengan perkebunan kelapa sawit, baik yang dilakukan secara intensif, semi intensif dan ekstensif.
10. Populasi kerbau di Banten tidak sebanyak di Jawa Tengah, namun rasio populasi sapi terhadap kerbau jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan populasi kerbau di Banten jauh lebih besar dari populasi sapi. Umumnya petani memelihara kerbau dengan sistem digembala dan mengarit rumput. Pemotongan ternak untuk konsumsi di kawasan Banten Selatan khususnya Lebak didominasi oleh kerbau. Sebaliknya di kawasan Utara seperti Serang, Tangerang dan Pandeglang didominasi oleh sapi dari *Feedlotter*, dimana sapi bakalannya berasal dari impor.

11. Jumlah perusahaan peternakan sapi skala menengah dan skala besar semakin meningkat, sebaliknya terjadi pada perusahaan peternakan kerbau. Minat usaha penggemukan lebih besar disebabkan oleh keuntungan yang dihasilkan lebih besar dan pengembalian modal usaha lebih cepat dibandingkan dengan usaha pembibitan. Keterbatasan jumlah usaha pembibitan menyebabkan produksi sapi bakalan menjadi terbatas, sedangkan permintaannya terus meningkat, akibatnya harga sapi bakalan terus naik.
12. Pada Usaha sapi potong skala kecil, Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan cenderung naik. Lonjakan jumlah RUTP terjadi pada tahun 2013 yaitu 5,1 juta dari tahun 2003 hanya 2,6 juta. Peningkatan tersebut didorong oleh program pemerintah pada periode 2010-2014, yaitu Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau. Namun demikian jumlah sapi yang dikuasai RTUP semakin menurun. Pada RTUP kerbau, semua peubah sejak RTUP, populasi dan pemilikan per rumah tangga cenderung menurun.
13. Pangsa daging sapi domestik masih lebih besar dari pasokan impor. Pada tahun 2014 pasokan lokal 65 persen dan impor 35 persen. Terdapat fluktuatif pangsa pasokan yang lebih disebabkan kebijakan buka tutup kran impor dalam upaya meningkatkan peran pasokan domestik. Peningkatan peran pasokan daging sapi domestik tanpa didukung peningkatan populasi menyebabkan pengurusan populasi ternak sapi di Indonesia. Sebaliknya impor tanpa pengendalian dapat menghambat perkembangan produksi daging sapi domestik.
14. Tingginya permintaan daging sapi di dalam negeri menyebabkan harga daging sapi terus meningkat. Usaha importir ternak dan daging sapi sangat menguntungkan sehingga mendorong banyak pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan ini.
15. Pasar impor daging sapi di Indonesia mengarah pada pasar persaingan sempurna dengan nilai IHH antara 0 – 1 dan nilai CR4 < 0,4. Pada tahun 2010 pasar impor daging sapi memiliki nilai IHH 0.079, kemudian menurun menjadi 0,056 dan stabil dikisaran 0,04 sejak tahun 2012.
16. Selama 10 tahun terakhir terjadi perubahan status perdagangan sapi/kerbau pada beberapa provinsi. Perubahan ini semakin menambah jumlah provinsi defisit sapi dari 12 provinsi menjadi 19 provinsi, sedangkan pada kerbau dari 13 menjadi 14 provinsi. Perubahan tersebut dapat terjadi karena meningkatnya pendapatan sehingga permintaan terhadap daging sapi/kerbau naik, sedangkan kemampuan produksi terbatas.

Kelayakan Usaha

17. Keberhasilan usaha penggemukan sapi potong ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu penambahan bobot badan yang ditentukan oleh bangsa sapi, umur sapi

bakalan, pakan/ransum yang diberikan, dan teknik pengelolaannya termasuk ada tidaknya integrasi vertical dan horizontal. Pakan yang diberikan terdiri dari pakan konsentrat dan hijauan/limbah tanaman pertanian. Bagi peternak kecil, pakan hijauan diperoleh dengan cara mencari yang membutuhkan waktu lama. Tenaga kerja mencari rumput dan memelihara sapi merupakan tenaga kerja dalam keluarga. Pada usaha skala menengah dan besar pakan dan tenaga kerja diperoleh dengan cara membeli dan mempekerjakan tenaga kerja yang diupah.

18. Umumnya pemeliharaan kerbau di Banten dilakukan dengan sistem digembalakan. Usaha ternak kerbau tidak dipisahkan antara usaha penggemukan dan pembibitan, tetapi merupakan satu kesatuan usaha. Fenomena Banten menunjukkan makin menyempitnya lahan penggembalaan menyebabkan usaha kerbau makin menjauh ke pedalaman. Peternakan kerbau skala menengah dan besar sudah tidak ada.
19. Tidak terlihat secara jelas bahwa makin besar skala usaha makin besar keuntungan. Tingkat keuntungan bervariasi menurut lokasi, tujuan usaha dan ras sapi yang diusahakan. Pada usaha skala kecil, jika biaya tenaga kerja dalam keluarga diperhitungkan maka keuntungan usaha lebih rendah atau bahkan merugi, sedangkan jika tidak usaha ini masih menguntungkan. Pada usaha skala menengah dan besar, dengan menghitung semua biaya, usaha penggemukan masih menguntungkan. Usaha sapi qurban lebih tinggi keuntungannya dibandingkan sapi untuk kebutuhan rumah potong. Sapi PFH lebih menguntungkan dari sapi persilangan Brahman dan PO.

Kinerja Manajemen Rantai Pasok

20. Tipe struktur pengelolaan rantai pasok ternak dan daging pada industri peternakan sapi dan kerbau nasional masih banyak masuk kategori "keterkaitan pasar" yang dicirikan oleh banyaknya alternatif rantai pasok dan rendahnya integrasi/koordinasi antar pelaku.
21. Pada usaha penggemukan sapi skala kecil partisipasi penerapan SCM umumnya cukup baik yaitu 73-91 persen, hanya perencanaan penjualan masih 50 persen. Ini mendukung fenomena selama ini bahwa masih ada usaha penggemukan sapi merupakan tabungan rumah tangga, penjualan sapi akan dilakukan sesuai kebutuhan. Pada umumnya kinerja SCM peternak sapi skala kecil masuk kategori sedang.
22. Pada usaha penggemukan kerbau skala kecil partisipasi penerapan SCM sangat variatif antar indikator yaitu 0 – 85 persen dengan modus 54 persen. Hal ini dinilai wajar karena usaha ini masih dilakukan secara tradisional dengan sistem gembala. Namun demikian ketepatan waktu pengiriman kerbau bakalan

merupakan hal yang dipentingkan bagi peternak. Pada umumnya kinerja SCM peternak kerbau skala kecil masuk kategori sedang.

23. Pada usaha penggemukan sapi skala menengah dan besar penerapan SCM lebih baik dibandingkan dengan usaha skala kecil, yaitu antara 80-90 persen. Tingginya partisipasi penerapan SCM disebabkan ada usaha yang telah melakukan integrasi vertikal. Kinerja SCM umumnya baik hingga sangat baik.
24. Pada usaha penggemukan sapi skala kecil, umumnya tingkat kepuasan saat membeli sapi bakalan sedang sampai sangat baik. Hanya indikator kontinuitas masih ada yang kurang. Hal ini mengindikasikan sebagian responden mengalami kesulitan untuk mendapatkan sapi bakalan sesuai kualitas dan harga yang diinginkan. Pada usaha penggemukan kerbau umumnya menggunakan kerbau bakalan hasil pengembangbiakan milik sendiri, sehingga penerapan kinerja rantai pasok terkait tingkat kepuasan pemesanan kerbau bakalan sama sekali belum diterapkan. Pada usaha skala menengah dan besar umumnya tingkat kepuasan sedang hingga sangat baik.
25. Usaha skala kecil belum memperhatikan *handling* saat pengiriman, sedangkan pada usaha skala menengah dan besar umumnya telah memperhatikan hal itu. Selama ini usaha skala kecil, sedang dan menengah belum pernah melakukan komplain terhadap sapi/kerbau bakalan yang dibeli dan diterima dalam kondisi kurang baik.
26. Potensi nilai tambah yang dapat dilihat dalam studi ini terjadi pada tingkat *on farm*, industri pengolahan daging, penjualan daging segar dan beku serta industri kuliner. Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa pada usaha sapi skala kecil, usaha penggemukan lebih menguntungkan dibandingkan usaha kombinasi antara penggemukan dan pembibitan. Usaha sapi penggemukan yang integrasi vertikal dan horizontal lebih menguntungkan dibandingkan yang tidak melakukan integrasi. Usaha penggemukan untuk penyediaan sapi qurban lebih menguntungkan dibandingkan dengan untuk penyediaan konsumsi sehari-hari. Usaha penggemukan sapi ras PFH lebih menguntungkan dibandingkan sapi ras persilangan PO/Brahman.
27. Proses pengolahan daging dari tahap *grading* dan kemasan sampai mengubah bentuk memberikan nilai tambah, namun jika memperhitungkan potensi pasar (omset penjualan) pengolahan daging gelondongan menjadi potongan dan kemasan tertentu, pengolahan bakso yang diikuti dengan usaha kuliner bakso, dan industri kuliner lainnya memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Masalah dan Kendala Penerapan Manajemen Rantai Pasok

28. Usaha sapi potong masih merupakan usaha sampingan dan berfungsi sebagai tabungan. Penjualan sapi diputuskan berdasarkan kebutuhan rumah tangga dengan tidak banyak memperhatikan faktor ekonomi, sehingga sulit memperkirakan jumlah sapi siap jual agar dapat dimasukkan dalam satu rangkaian SCM. Untuk menghasilkan produk daging yang baik diperlukan sapi bakalan dan pakan berkualitas. Pengamatan pedagang, untuk mendapatkan sapi bakalan berkualitas semakin sulit. Kondisinya adalah kualitas menurun dan harganya semakin meningkat. Ada ketidakpastian usaha budidaya sapi, yaitu terkait dengan kebijakan pengendalian impor ternak dan daging sapi. Bagi pelaku usaha hal yang terpenting adalah jaminan pasar dan stabilitas harga.
29. Perdagangan sapi siap potong dalam bentuk hidup memiliki risiko penyusutan berat badan saat transportasi, diperjualbelikan di pasar dan disembelih di RPH. Penyusutan berat badan tersebut menurunkan nilai tambah atau menaikkan harga produk. Upaya-upaya pemerintah memfasilitasi rantai dingin sudah dilakukan, namun sebagian konsumen masih enggan mengonsumsi daging beku. Masih diperlukan edukasi pada konsumen terkait penggunaan daging beku untuk konsumsi.
30. Proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan untuk bakso menentukan kualitas dan harga. Banyak ditemui kualitas bakso yang jelek akibat penggunaan formalin dan mencampur bahan lain agar biaya murah dan keuntungan besar. Untuk mencegah itu faktor penting adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk.
31. Untuk membangun kandang koloni agar usaha skala kecil menjadi skala besar juga mengalami keterbatasan dana untuk pengadaan lahan dan kandang. Usaha skala kecil daya tawarnya rendah dan tidak dapat diandalkan untuk memasok dalam jumlah tertentu secara kontinu, sehingga sulit melakukan kerjasama dalam satu SCM. Jejaring pemasaran yang dibangun oleh gabungan kelompok peternak seperti Asosiasi Peternak Sapi Indonesia (ASPIN) di Boyolali dan Koperasi Peternak di Lamongan dan Tuban merupakan salah satu solusi untuk menghadapi kendala ini.
32. Perdagangan sapi dari sentra produksi ke sentra konsumsi di Jabodetabek menjadi kegiatan ekonomi biaya tinggi karena menghadapi beberapa kendala, diantaranya: (1) Waktu tempuh selama proses transportasi ternak hidup semakin panjang akibat makin padatnya lalu-lintas darat, sehingga penyusutan berat badan sapi akan semakin tinggi; (2) Adanya produk ternak dan daging sapi impor yang makin berkembang di sekitar Banten dan Jawa Barat menyebabkan harga ternak dan daging sapi menjadi tidak stabil, sementara harga sapi di sentra produksi cenderung naik; dan (3) Pedagang daerah

menghadapi komunitas perdagangan yang belum *clean trading*, sehingga beberapa dari mereka kesulitan menerima pembayaran bahkan ada yang tidak menerima pembayaran karena kecurangan.

33. Modal sosial berupa hubungan emosional antar pelaku rantai pasok yang menyebabkan secara ekonomi rantai pasok menjadi tidak efisien, namun hal itu tetap dipertahankan oleh pelaku rantai pasok. Kasus-kasus yang dijumpai adalah: pedagang sapi di pasar hewan membiarkan transaksi melalui makelar; pelaku rantai pasok dapat membeli sapi dengan harga yang murah, namun karena sudah berhubungan lama dengan pemasok tertentu maka pembelian tetap dilakukan walaupun harga lebih mahal demi menjaga hubungan yang selama ini sudah berjalan harmonis dan saling menguntungkan. Transaksi jual-beli sapi menggunakan sistem taksir masih dipertahankan, padahal timbangan ternak tersedia di pasar hewan.
34. Konsolidasi kelembagaan kelompok peternak masih rendah, akibatnya konsolidasi pasar input dan output juga rendah. Kondisi tersebut menyebabkan industri kuliner dan *end user* menghadapi ketidakpastian melakukan kerjasama dengan peternak dan berharap pada pasokan impor yang lebih pasti jumlah dan kualitas serta variasi potongan daging yang digunakan.
35. Dari waktu ke waktu pemerintah terus meningkatkan perannya dalam membina rantai pasok agar industri sapi potong nasional menjadi lebih berdaya saing. Namun kebijakan untuk mendukung penataan SCM masih bersifat parsial, seperti mengembangkan usaha budidaya pola kelompok dan kandang koloni dengan program Sarjana Membangun Desa, merehabilitasi dan memfasilitasi pasar hewan dan rumah potong hewan.
36. Untuk mendukung optimalisasi RPH dan fasilitas pendukung yang tersedia serta mengedukasi pemasaran daging sapi dengan rantai dingin, Kementerian Pertanian mensyaratkan bahwa pelaku usaha yang memasukkan produk impor tersebut diwajibkan menyerap daging sapi lokal yang dipotong pada RPH memiliki Nomor Kontrol Veteriner. Dari kasus yang diamati di salah satu RPH di Jawa Barat, permasalahan yang dihadapi untuk memenuhi syarat tersebut adalah keterbatasan stok sapi lokal dan harga produk yang relatif mahal.
37. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong industri ternak sapi cenderung di sektor budidaya. Pada sektor lain masih kurang mendapat perhatian. Seperti akses kredit program hanya ada di Perbibitan (KUPS) dan penggemukan (KKPE) sapi. Pada sektor hilir seperti transportasi ternak, pedagang pemotong, kegiatan pengeceran/retail tradisional, dan industri rumah tangga pengolahan daging (dendeng dan abon) serta kuliner masih belum banyak disentuh. Pada hal itu perlu dilakukan agar dapat melakukan pembinaan

terkait penyediaan bahan pangan asal ternak yang memenuhi syarat higienis dan halal (ASUH: aman, sehat, utuh dan halal).

IMPLIKASI KEBIJAKAN

38. Untuk memperbaiki struktur industri sapi/kerbau maka perlu: (1) Dikembangkan usaha pembibitan secara konsisten dan berkesinambungan di kawasan perkebunan kelapa sawit dan daerah sentra produksi utama; (2) Mengembangkan industri pakan skala kecil berbasis bahan baku lokal; dan (3) Pengembangan kerbau perlu ditingkatkan dengan dukungan penelitian dan penyuluhan serta difokuskan pada daerah dengan nilai rasio sapi/kerbau rendah.
39. Untuk meningkatkan keuntungan usaha ternak sapi dan kerbau, dapat dilakukan dengan cara: (1) Meningkatkan skala usaha peternakan rakyat; (2) Mengintegrasikan dengan usaha lain secara horizontal, terutama dalam hal penyediaan pakan dan pemanfaatan pupuk organik dan biogas berbahan baku kotoran ternak; (3) Peningkatan peran teknologi budidaya dan manajemen usahaternak sehingga dapat meningkatkan produktivitas; dan (4) Meningkatkan posisi tawar peternak dengan memperbaiki sistem informasi.
40. Untuk meningkatkan penerapan SCM dan daya saing daging sapi/kerbau perlu dikembangkan: (1) Usaha yang terintegrasi/terkoordinasi secara vertikal dengan melibatkan usaha skala kecil, menengah, dan besar; (2) Perlu peningkatan manajemen pemeliharaan sapi potong (*good farming practice*) pada pelaku usaha skala kecil dalam satu kawasan; (3) Konsolidasi peternak dalam wadah kelompok peternak, koperasi peternak, dan asosiasi peternak yang mampu mengakses berbagai rantai pasok yang ada; (4) Melakukan pembinaan usaha skala kecil dan memediasi hubungan skala kecil dengan skala besar agar tercipta rantai pasok terpadu dan berdaya saing; (5) Diperlukan edukasi pada konsumen terkait penggunaan daging beku untuk konsumsi dan mendukung kebijakan serapan daging lokal; (5) Melakukan pengendalian impor ternak dan daging sapi sesuai kebutuhan dan membatasi jalur rantai pasok produk impor ke sentra-sentra produksi sapi potong; (6) kebijakan pemerintah dalam pengembangan rantai pasok secara terpadu dan berdaya saing dengan mengharmoniskan kebijakan peningkatan produksi di dalam negeri dengan kebijakan impor; (7) Diseminasi teknologi dari hulu hingga ke hilir agar produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar dan preferensi konsumen.